

## PENDAHULUAN

### I. PROFILE LEMBAGA

Program magang dilaksanakan di Kementerian perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia/ Badan perencanaan pembangunan nasional Jakarta. Kegiatan magang dilaksanakan selama dua bulan, pada bulan Februari sampai bulan April. Kegiatan magang dilaksanakan secara hybrid (WFH dan WFO). Dalam pelaksanaan dari program magang ini mahasiswa akan diminta untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti menghadiri pertemuan rapat dan FGD dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, serta melakukan penelitian tentang isu-isu internasional terutama yang berkaitan dengan fungsi kerja dari Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat lulus dari kegiatan magang mahasiswa. Disini penulis mengangkat tema penelitian tentang peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia, dengan penelitian yang berjudul “Peran Perempuan Indonesia dalam Meningkatkan Perdamaian Dunia melalui Un Female Peacekeepers”.

Kementerian perencanaan pembangunan nasional Republik Indonesia/ Badan perencanaan pembangunan nasional merupakan kementerian yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berkolaborasi dengan unit organisasi dan sumber daya lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Kementerian PPN dipimpin oleh Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala PPN.<sup>1</sup> Kementerian PPN memiliki fungsi sebagai berikut<sup>2</sup>;

1. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses melalui [https://www.bappenas.go.id/files/4114/6578/9509/Peraturan\\_Menteri\\_Bappenas\\_No\\_4\\_Tahun\\_2016.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/4114/6578/9509/Peraturan_Menteri_Bappenas_No_4_Tahun_2016.pdf)

<sup>2</sup> Peran dan Fungsi Kementerian PPN /Bappenas , diakses melalui <http://www1.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/tupoksi/>

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN;
4. Melakukan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN; dan
5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugasnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Staf Ahli dan Inspektur Utama dan 9 Deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu<sup>3</sup>, Salah satunya adalah Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan yang bertugas untuk menyeleggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 14 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas, Kedeputian Bidang politik hukum, pertahanan dan keamanan memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Direktorat Politik dan Komunikasi, Direktorat Aparatur Negara, Direktorat Hukum dan Regulasi, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dan Direktorat Pertahanan dan Keamanan.

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 14 2020 pasal 161 menyebutkan bahwa Direktorat polugri dan KPI ini memiliki tugas dalam melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional.<sup>4</sup> Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional merupakan salah satu direktorat di Kementerian PPN/Bappenas yang membuka program

---

<sup>3</sup> Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas, diakses melalui <http://www1.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/struktur-organisasi/>

<sup>4</sup> Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, diakses melalui <http://www1.bappenas.go.id/index.php?clD=351>

magang bagi seluruh mahasiswa universitas di Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan program kerja dari Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

## II. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan perkembangan berbagai bidang isu gender telah menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji lebih jauh, hal ini dikarenakan dalam waktu yang panjang seringkali beranggapan bahwa perempuan tidak kompeten untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di berbagai bidang. Tujuannya untuk membangun pandangan baru serta kepercayaan masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang perdamaian. Dalam isu perdamaian saat ini partisipasi perempuan telah menjadi salah satu isu penting yang perlu untuk terus ditingkatkan, baik di level nasional maupun level internasional. Keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian ini dianggap penting karena peran perempuan dalam proses perdamaian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan peacemaking dan peacebuilding. Hal ini didasarkan oleh peranan perempuan memiliki akses yang lebih baik dalam melakukan pendekatan terhadap perempuan dan anak di wilayah konflik, khususnya pada korban kekerasan berbasis gender. Dengan penelitian ini dirasa penting untuk mengetahui bentuk peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

Setelah perang dunia kedua, pemeliharaan perdamaian dunia dan keamanan internasional telah menjadi salah satu misi penting dunia, hal ini dikarenakan agar terciptanya perdamaian dunia. Untuk itu dibentuklah sebuah organisasi internasional yang disebut PBB pada tahun 1945, dengan harapan dapat menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. *Peacekeeping* telah menjadi instrumen utama dari PBB untuk menjaga tatanan dan perdamaian dunia. *Peacekeeping* merupakan salah satu agenda kerja PBB yang ditujukan untuk membantu, mengawasi dan menyelesaikan konflik bersenjata. *Peacekeeping* menjadi metode tradisional PBB dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai (*peaceful settlement of dispute*), antara lain melalui negosiasi dan mediasi atau dengan metode penggunaan kekuatan secara paksa (*force enforcement*) sesuai mandat yang diberikan oleh Bab VII dari piagam PBB.<sup>5</sup> Ketika pertama kali dibentuk, *Peacekeeping Operations (PKO)* seperti melakukan proses bina damai yang berkelanjutan dan mengembalikan kondisi kondusif bagi pelaksanaan perdamaian. PKO melaksanakan mandat tersebut melalui patroli perbatasan serta memisahkan pihak yang berkonflik. Peran dan tanggung jawab ini mulai bergeser selama dua puluh tahun terakhir

---

<sup>5</sup> Osman Cavusoglu, E, *Challenges to United Nation Peacekeeping Operations in the post cold war era*, *Perceptions: Journal of International Affairs*, vol. 4, hal. 4, 1999

setelah perang antar negara mulai berkurang dan digantikan oleh konflik intra- negara dan antar-etnis yang lebih kompleks. Dalam kerangka baru operasi penjaga perdamaian, telah ada pengakuan bahwa pendekatan gender yang memadai sangat penting untuk menanggapi kebutuhan wanita, pria, anak laki-laki dan wanita yang hidupnya telah dipengaruhi oleh konflik.

Dalam perkembangannya , PBB telah berupaya untuk mengagendakan keseimbangan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, yakni pada tahun 2000, Dewan keamanan PBB telah menyetujui Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1325 tentang “*Women, Peace and security*”.<sup>6</sup> PBB secara resmi telah mengeluarkan mandat terhadap perempuan, perdamaian dan keamanan (PKK), sehingga diharapkan akan ada kesetaraan gender atas peran-peran dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan.<sup>7</sup> Indonesia sebagai anggota PBB berkomitmen pada tujuan dan prinsip yang terdapat pada piagam PBB, khususnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Hal ini didasari oleh pembukaan UUD Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu ikut serta dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dilakukan atas dasar prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, sesuai dengan hak dan kedudukan serta prinsip non-intervensi terhadap urusan domestic Negara lain. Selain itu politik bebas aktif juga dapat diartikan Indonesia bebas untuk menjalin kerja sama dengan Negara manapun , serta turun aktif dalam organisasi internasional untuk bekerjasama dalam menjaga perdamaian dunia. Pada saat ini di Indonesia isu gender dan perdamaian dunia ini terus dikembangkan. Hal ini telah dibahas selama dua periode dalam bentuk Rancangan Pembangunan dalam Jangka Menengah (RPJMN) yang disahkan langsung oleh Presiden Indonesia. Berdasarkan arahan kebijakan RPJMN 2015-2019 ditargetkan bahwa akan adanya peningkatan kesetaraan gender dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan hal ini juga didukung dalam RPJMN 2020-2024 yang arahkan kebijakannya di buat untuk mengoptimalisasikan kebijakan luar negeri Indonesia dengan cara meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia.

Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P Marsudi pada seminar virtual dengan

---

<sup>6</sup> Geuskens, Isabelle , “*Introducing in gender and militarism analyzing the links to strategize for peace*”, Women Peacemakers Program, Den Hag, 2014

<sup>7</sup> Un Women, “*Women, peace and security in the work of the UN security council*” , diakses melalui <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/un-security-council> pada 22 februari 2021

Tema “*The Role of Women Negotiators and Mediators in the Maintenance of Regional Peace and Security*” tantang Indonesia terus berupaya mewujudkan peran dan kontribusi perempuan sebagai agen perdamaian dalam tataran global.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat pada kontribusi Indonesia dalam mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam berbagai konflik bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah di dunia. Indonesia pertama kali mengirimkan *female* peacekeeper nya pada tahun 2008 dalam misi *United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)*.<sup>9</sup> Adapun pada tahun 2015, dibentuknya peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 tahun 2015 tentang peta Jalan Visi 4.000 personel pemeliharaan perdamaian 2015-2019. Hal ini juga menjadi salah satu titik awal dalam melihat tren pengiriman *female peacekeeper* Indonesia dalam mendukung visi 4.000 personel tersebut. Tahun 2016 merupakan puncak dari pengiriman personil wanita terbesar Indonesia sejak tahun 2009-2016, yang mana pengiriman personil wanita ini banyak dikirimkan dalam misi UNIFIL di Lebanon hingga Desember 2016.<sup>10</sup> Bagi Indonesia, pengiriman *female peacekeeper* merupakan salah satu strategi dalam pertahanan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya Indonesia dalam meningkatkan perdamaian dunia melalui *UN Female Peacekeeper*

### III. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

**“Bagaimana kontribusi Indonesia dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian melalui UN female peacekeepers?”**

### IV. KERANGKA PEMIKIRAN

#### 1. Resolusi 1325 : Women ,Peace and Security

Resolusi 1325 yang diadopsi oleh dewan keamanan PBB pada tahun 2000 tentang *Women ,Peace and Security* merupakan resolusi pertama DK PBB dalam membahas dampak konflik bersenjata terhadap wanita. Yang mana pada resolusi tersebut sangat di tekanan kan

---

<sup>8</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia “ Indonesia suarakan peran dan kontribusi perempuan sebagai agen perdamaian” , diakses pada 2021  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1439/berita/indonesia-sua%20rakan-peran-dan-kontribusi-perempuan-sebagai-agen-perdamaian>

<sup>9</sup> TNI P, “*TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian : Peran PMPP TNI dalam menyiapkan kontingen garuda*” , Jakarta : Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian

<sup>10</sup> Leonard F. Hutabarat,P, “*Peningkatan female peacekeeper Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB*” , 2017

bahwa “*women’s equal and full participation*” sebagai salah satu agen yang berperan aktif dalam pencegahan dan resolusi konflik, bina perdamaian dan pemeliharaan/penjagaan. Tujuan dari resolusi ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan terkait dengan perlindungan, akses atas sumber daya dan pelayanan, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan sebagai salah satu dari upaya untuk memperoleh dan mempertahankan perdamaian dan keamanan. Dalam resolusi tersebut menghimbau kepada seluruh Negara anggota PBB untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kontribusi wanita dan keterlibatan penuh untuk semua upaya dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan, dan juga mendesak para *aktor* untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam semua bidang *peace building*. Resolusi tersebut merupakan salah satu pergeseran kebijakan PBB untuk melibatkan wanita dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

Menurut Herve Ladsous selaku mantan *Head of UN Peacekeeping* menyebutkan bahwa, “*Women can and must play a leading role in political participation, conflict resolution and the transition from conflict to peace*”.<sup>11</sup> Yang menekankan pada bahwa peranan perempuan tidak hanya dalam bidang militer saja melainkan terdapat juga beberapa peranan lainnya.

## 2. Pendekatan feminisme

Menurut J. Ann Tickner feminisme hadir pada tahun 1960-an dalam Hubungan Internasional yang bertujuan untuk kesetaraan politik, sosial dan ekonomi bagi perempuan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkritisi pandangan realisme tentang kaum maskulin yang mendiskriminasi perempuan. Sehingga dijelaskan bahwa para feminisme didefinisikan gender sebagai seperangkat karakteristik yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, seperti contoh perempuan sering kali dianggap sebagai individu yang lemah dan privat sementara laki-laki dinilai sebagai karakteristik yang kuat.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, feminisme berupaya untuk melibatkan perempuan pada bidang keamanan untuk mengembangkan pandangan mengenai

---

<sup>11</sup> “Security Council Open Debate on Women, Peace and Security (Sexual Violence)”, 23rd of February 2012, Security Council Chamber Statement by Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, Hervé Ladsous, to the United Nations”  
[https://www.peacewomen.org/sites/default/files/japan\\_svic\\_2012\\_0.pdf](https://www.peacewomen.org/sites/default/files/japan_svic_2012_0.pdf)

<sup>12</sup> Baylis, J, et al. (2014). Gender in World Politics. In: 6th, ed. *The Globalization of World Politics*, s.l.:Oxford University Press.

perang, hal ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya dampak negatif pada perempuan dan warga sipil. Pada pendekatan tradisional hubungan internasional yang hanya berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan Negara hanya dibangun oleh laki-laki. Padahal sebenarnya dalam meningkatkan *peacebuilding* kehadiran dan peran perempuan sangat dibutuhkan di dalamnya, hal ini yang hingga saat masih menjadi perdebatan beberapa pihak dikarenakan pada faktor biologisnya akan berdampak negatif seperti pelecehan seksual, tuntutan fisik dan peran mereka dalam mengurus keluarga.<sup>13</sup>

Saat ini pendekatan feminisme ini telah menjadi penting dalam isu pertahanan dan keamanan dunia, seiring berjalannya waktu dalam dalam menciptakan *peacebuilding*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadopsinya resolusi 1325 oleh dewan keamanan PBB pada tahun 2000, yang menekankan dalam resolusi konflik peran perempuan telah menjadi sebuah hal yang dibutuhkan. Resolusi 1325 merupakan salah satu dasar dibentuknya *UN female peacekeeping*, yang mana *female peacekeepers* ini bertindak sebagai *role models* bagi lingkungan setempat yang menginspirasi wanita dan anak perempuan dalam masyarakat yang di partisipasinya dalam memelihara perdamaian dunia sering kali di dominasi oleh laki-laki. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengiriman partisipasi perempuan dalam misi perdamaian dunia. Hal ini juga didukung dengan *UN Peacekeeping Principle*, yang mana dalam implementasinya didukung dengan prinsip-prinsip tersebut.

## V. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Batasan Penelitian

Batas penelitian atau jangkauan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas-batas penulisan agar tidak keluar dari topic pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan komitmen dan bentuk partisipasi *un female peacekeepers Indonesia* dalam meningkatkan partisipasi perempuan misi perdamaian dunia.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disini dapat dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai teknik

---

<sup>13</sup> Tickner, J. A. (2004). Feminist responses to international security studies. *Peace review: A Journal of Social Justice*, 16 (1), pp. 43-48.

pengumpulan data, yang mana tinjauan pustaka ini berupa dokumen tertulis seperti jurnal, buku, surat kabar, dan internet.

### **3. Aspek Hubungan Internasional**

Aspek hubungan internasional yang berkaitan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk peranan pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam un female peacekeepers Indonesia dalam meningkatkan partisipasi peran perempuan di misi perdamaian dunia.